



## Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Bisnis.com (22 November 2016, Indonesia)

Page: <http://koran.bisnis.com/read/20161122/447/604975/otomatisasi-ancaman-atau-peluang>

# Otomatisasi, Ancaman atau Peluang?

✍ Demis Rizky Gosta

📅 Selasa, 22/11/2016 09:18 WIB



Periode Oktober—November memang jadi tanggal langganan demonstrasi buruh. Soalnya bulan-bulan ini adalah masa jelang penetapan upah minimum oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia.

Hanya saja, tahun ini buruh harus rela kehilangan panggung gara-gara unjuk rasa besar-besaran di awal November. Akhirnya berita *demo* buruh nyaris absen dari media. Organisasi buruh akhirnya ‘rela’ berbagi panggung. Pekan ini mereka memutuskan bergabung dengan rencana aksi *demo* yang lebih menyita perhatian politisi dan media.

Situasinya jelang penetapan upah minimum sebenarnya hampir selalu sama. Buruh minta upah minimum naik, pengusaha bilang *ketinggian*, kepala daerah harus putusan. Kini, pemimpin di daerah tidak bisa lagi seenaknya menetapkan kenaikan upah minimum di wilayah kekuasaannya. Pemerintah pusat telah mengontrol kenaikan upah minimum lewat formula yang memperhitungkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi sejak 2013.

Awalnya adalah Instruksi Presiden No. 9/2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tahun lalu diperkuat oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah No. 78/2015.

Semangatnya dituliskan secara tegas di Pasal 43 PP No. 78/2015, yang intinya menyatakan penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan kuncinya ada di faktor produktivitas. Buat pemilik usaha, apalagi yang bergerak di sektor padat karya, upah dan produktivitas adalah dua sisi dari uang logam. Permasalahannya di Indonesia adalah laju pertumbuhan produktivitas pekerja tergolong lambat dibandingkan dengan laju kenaikan upah minimum.

Data Asian Productivity Organization menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata produktivitas per jam pekerja Indonesia pada periode 2000–2013 hanya sebesar 3,1%. Pada periode yang sama, upah minimum pekerja di Banten naik 22% dari Rp955.300 pada 2010 menjadi Rp1,17 juta pada 2013.

Laju pertumbuhan produktivitas pekerja Indonesia juga sangat rendah dibandingkan dengan negara kompetitor. Pada periode 2000–2013 produktivitas per jam pekerja di Vietnam naik 4,5%, India naik 5,2%, sedangkan China melesat 8,8%. Bahkan negara industri maju seperti Korea Selatan masih membukukan kenaikan produktivitas 4% pada periode tersebut.

Permasalahan produktivitas tersebut, jelas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani adalah masalah *pertama* yang dihadapi Indonesia akibat laju kenaikan upah minimum.

Industri yang mempekerjakan ribuan orang seperti pabrik sepatu dan garmen menghadapi masalah daya saing karena kesulitan menawarkan rantai pasok yang efisien dibandingkan negara lain. Permasalahan buat industri padat karya semakin pelik karena permasalahan otomatisasi mengintip di belakangnya.

### **Tak Bisa Dihindari**

Otomatisasi, jelas Hariyadi, tidak bisa dihindari. Perkembangan teknologi memaksa setiap perusahaan beralih ke mesin dan komputer agar bisa berproduksi lebih efisien. Namun, peralihan ke sistem produksi otomatis membutuhkan waktu dan mahal. Selama pekerja bisa semakin produktif dan menghabiskan biaya lebih rendah dari mesin ajaib, peralihan tertunda.

Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan 56% dari pekerja di sektor industri manufaktur Indonesia terancam oleh otomatisasi dalam 10—20 tahun ke depan. Ancaman paling besar ada di sektor industri garmen dan elektronik. Lebih dari 60% pekerja di sektor industri tersebut bisa kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi.

ILO menaruh perhatian khusus pada sektor tekstil, garmen, dan alas kaki yang dinyatakan sebagai sektor industri yang pekerjaannya paling rentan tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi seperti pencetakan tiga dimensi (*3D printing*), teknologi pemindai bentuk tubuh, desain lewat bantuan komputer, *wearable technology*, hingga robotik bisa mengubah pola global industri tekstil, garmen, dan alas kaki secara drastis.

Vice President PT KMK Global Erry Sunarli mengatakan setiap perusahaan tidak bisa menghindari proses otomatisasi, termasuk perusahaan padat karya seperti industri alas kaki. KMK Global, yang memproduksi sepatu olahraga antara lain untuk Nike dan Converse, saat ini mempekerjakan sekitar 16.000 orang di Tangerang, Banten dan bersiap mengoperasikan pabrik baru di Salatiga, Jawa Tengah yang bisa menyerap 3.000—5.000 pekerja.

Erry menjelaskan perusahaan yang tidak melakukan proses otomatisasi demi mempekerjakan sebanyak mungkin pekerja justru terancam kehilangan pesanan. Di sisi lain, otomatisasi meningkatkan produktivitas pabrik yang berarti lebih banyak pesanan. Ini akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan menambah pekerja baru.

Kini permasalahannya adalah ketersediaan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru tersebut. Masalah ini dihadapi oleh Erry dalam proses pengoperasian pabrik baru KMK di Jawa Tengah.

Permasalahan soal ketersediaan tenaga kerja ini, jelas Hariyadi, adalah sisa permasalahan *kedua* dari laju upah minimum yang tidak terkendali sebelum diatur pemerintah. Perusahaan yang mendirikan pabrik-pabrik garmen dan sepatu di Jawa Tengah karena terdesak kenaikan upah minimum di Jabodetabek sekarang kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang ahli.

Permintaan atas tenaga kerja di Jawa Tengah kini jauh lebih besar dari suplai tenaga kerja. Perusahaan *pun* terpaksa memasang upah yang lebih tinggi karena harus *rebutan* dengan perusahaan lain.

Hariyadi mengatakan ini adalah pekerjaan rumah utama pemerintah setelah berhasil mengontrol laju kenaikan upah minimum. Pemerintah harus bisa menciptakan tenaga kerja yang cakap buat era industri baru.

Sayangnya, laju kenaikan upah minimum di periode rezim formula upah minimum membuat waktu peralihan semakin singkat. “Otomatisasi yang tadinya butuh 10—15 tahun misalnya, jadi berkurang jadi 5—6 tahun. Di saat yang sama, angkatan kerja baru bermunculan. Pendidikan dan pelatihan jadi semakin mendesak,” kata Hariyadi.

Pendidikan keahlian penting. Ada satu hal menarik dari laporan ILO. Laporan itu juga mencantumkan sektor pekerjaan yang paling aman dari otomatisasi di Indonesia. ILO menyatakan sekitar 1,9 juta tenaga kerja di bidang pendidikan paling aman. Artinya penyerapan tenaga kerja di sektor pendidikan dan pelatihan bisa terus tumbuh di tengah otomatisasi sekaligus membuat pekerja di sektor lain bisa lebih adaptif terhadap otomatisasi.

Kondisi ini harus disadari oleh pekerja. Buruh tidak boleh diam. Mereka harus menuntut perusahaan dan pemerintah menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan agar keahlian mereka tidak ketinggalan zaman. hanya buat mereka, tetapi buat anak-anak mereka. Agar ketika sepatu mulai di-*print* dan baju dijahit jari jemari robot, mereka bisa jadi operatornya, atau justru melatih operator baru.